

# RELASI KEKUASAAN DALAM WACANA KONFLIK KPK VS POLRI JILID II

## POWER RELATION IN THE DISCOURSE OF CONFLICT BETWEEN CORRUPTION ERADICATION COMMISSION (KPK) VS INDONESIAN NATIONAL POLICE (POLRI) PART II

**Endro Nugroho Wasono Aji**

Balai Bahasa Jawa Tengah  
Jalan Elang Raya No. 1, Mangunharjo, Tembalang, Semarang, Indonesia  
wasono\_ajie@yahoo.com

(Naskah diterima tanggal 17 Oktober 2019, direvisi terakhir tanggal 9 Desember 2019, dan disetujui tanggal 19 Desember 2019)

### **Abstrak**

Relasi kekuasaan berkaitan dengan kekuasaan individu, kelompok, atau institusi terhadap individu, kelompok, atau institusi lainnya. Salah satu pihak dalam hal ini berusaha mendominasi pihak yang lain. Relasi yang asimetris tersebut tergambar dalam konflik KPK vs Polri jilid II. Hal tersebut dideskripsi dalam wacana “Tajuk Rencana” harian *Suara Merdeka*. Makalah ini membahas bagaimana relasi-relasi yang terjalin dalam konflik KPK vs Polri jilid II yang dibahas dalam “Tajuk Rencana” harian *Suara Merdeka*. Untuk mengkaji relasi tersebut digunakan metode analisis isi kualitatif. Analisis isi kualitatif adalah suatu metode yang digunakan untuk memahami pesan dari suatu wacana. Relasi dalam wacana konflik KPK vs Polri jilid II dideskripsikan oleh redaksi *Suara Merdeka* dengan memanfaatkan aspek kebahasaan yang berupa kosakata dan gramatika. Pemanfaatan kosakata tersebut berupa penggunaan eufemisme dan kata-kata formal yang menonjol. Sementara itu, pemanfaatan gramatika berupa kalimat interogatif dan pronomina persona kita. Dalam mendeskripsikan relasi tersebut, redaksi menempatkan institusi Polri pada posisi dominan, sebaliknya institusi KPK pada posisi yang dimarginalkan oleh institusi Presiden dan Polri.

**Kata-Kata Kunci:** relasi kekuasaan; analisis wacana kritis; kosakata; gramatika

### **Abstract**

*Power relations are related to the power of individuals, groups, or institutions over individuals, groups, or other institutions. One party in this case tries to dominate the other party. The asymmetrical relationship is illustrated by the conflict between the Corruption Eradication Commission (KPK) and Indonesian Police (Polri) volume II. This was described in the editorial of Suara Merdeka daily newspaper. This paper discusses how the relations involved in the KPK versus Polri conflict volume II were discussed in the editorial of Suara Merdeka. To examine this relationship, qualitative content analysis methods are used. Qualitative content analysis is a method used to understand the message of a discourse. The relation in the KPK versus Polri conflict discourse volume II is described by Suara Merdeka editors by utilizing linguistic aspects in the form of vocabulary and grammar. Utilization of the vocabulary is in the form of the use of euphemisms and prominent formal words. Meanwhile, the use of grammar is in the form of interrogative sentence and personal pronouns we/us. In describing this relation, the editor put the Polri institution in a dominant position, while the KPK institution was marginalized by the President and Polri institutions.*

**Keywords:** power relations; critical discourse analysis; vocabulary; grammar

## 1. Pendahuluan

Dalam sebuah relasi sosial antara dua pihak, baik institusi maupun individu biasanya ada salah satu pihak yang menguasai atau mendominasi dan ada pihak yang dikuasai atau didominasi. Hubungan yang bersifat asimetris tersebut dinamakan relasi kekuasaan. Wacana atau penggunaan bahasa dalam hal ini dapat dipandang sebagai tempat bersemayamnya kekuasaan. Penggunaan bahasa merepresentasikan kekuasaan. Dengan kata lain, bahasa menjadi arena sekaligus alat kekuasaan di berbagai bidang kehidupan (Rokhman dan Surahmat, 2016: viii). Kekuasaan tidak dapat dijalankan dan direpresentasikan tanpa bahasa (Wahyuni, 2016: 45).

Pada tahun 2015 relasi kekuasaan tergambar dalam konflik KPK vs Polri jilid II. Pada saat itu konflik antara kedua institusi penegak hukum di Indonesia itu menjadi perhatian besar media masa di Indonesia. Salah satunya adalah harian *Suara Merdeka* Semarang. Konflik tersebut bahkan dibahas beberapa kali dalam "Tajuk Rencana" harian *Suara Merdeka*.

Konflik KPK dan Polri jilid II tersebut tidak hanya melibatkan kedua institusi tersebut, tetapi juga melibatkan institusi atau pihak lain, seperti: Presiden, mantan Presiden, parpol, DPR, bahkan masyarakat. Hal itu tergambar dalam wacana "Tajuk Rencana" Harian *Suara Merdeka* yang membahas konflik keduanya. Wacana tersebut menarik untuk dikaji secara lebih mendalam. Makalah ini akan membahas bagaimana relasi-relasi yang terjalin dalam wacana konflik KPK vs Polri jilid II yang terdapat dalam "Tajuk Rencana" harian *Suara Merdeka*.

Kajian tentang konflik KPK vs Polri telah beberapa kali dilakukan, antara lain oleh Aji dengan judul "Pandangan Harian *Suara Merdeka* dalam Konflik KPK Vs Polri Jilid II (Analisis Wacana Kritis pada "Tajuk Rencana")" yang dimuat di jurnal *Seloka*

(Aji, 2017: 256–264) dan "Gramatika dalam Wacana Konflik KPK Vs Polri Jilid II" yang dimuat di jurnal *Sawerigading* (Aji, 2018: 85–95). Selain itu, kajian dengan topik yang serupa pernah ditulis oleh Aslam dkk. (2017) dengan judul "Framing Pemberitaan Kasus KPK Vs Polri di Surat Kabar Tribun Timur". Kajian lainnya dilakukan oleh Hidayat (2018) dengan artikel ilmiah yang berjudul "Analisis Framing Robert Entman pada Pemberitaan KPK Vs Polri Jilid III (Studi Kasus pada Koran *Tempo* dan *Media Indonesia* Periode Januari Sampai dengan Juni 2015)".

Makalah Aji yang pertama (2017) dan kedua (2018) sama-sama membahas wacana konflik KPK vs Polri jilid II dengan menggunakan analisis wacana kritis Fairclough. Perbedaannya, makalah Aji (2017) hanya membahas kosakata sebagai pembawa ideologi, sedangkan tulisan kedua (2018) membahas dari sisi grammatikanya. Sementara itu, kajian ini membahas wacana konflik KPK vs Polri jilid II dari sudut pandang relasi yang terjalin dalam wacana. Untuk kajian Aslam dkk. (2017) dan Hidayat (2018), meskipun sama-sama membahas kasus KPK vs Polri, pisau analisisnya menggunakan analisis framing. Di samping itu, media yang menjadi sumber data juga berbeda.

Dalam konflik KPK vs Polri jilid II terdapat relasi antarpartisipan dalam wacana. Dalam konflik tersebut, ada partisipan baik individu, kelompok, atau institusi yang berkuasa terhadap partisipan yang lain. Kekuasaan tersebut terkait dengan kontrol dan pembatasan yang dapat dilakukan oleh partisipan yang berkuasa terhadap partisipan lain yang tidak berkuasa. Kontrol dan pembatasan-pembatasan tersebut dapat dibedakan ke dalam tiga jenis, yaitu isi, hubungan (relasi), dan subjek (Fairclough, 2003). Pada kesempatan ini, kajian dibatasi pada relasi yang terdapat dalam wacana

konflik KPK vs Polri jilid II yang terdapat dalam “Tajuk Rencana” harian *Suara Merdeka*.

## 2. Metode

Data dalam kajian ini diambil dari wacana “Tajuk Rencana” yang membahas konflik KPK vs Polisi Jilid II yang dimuat pada Harian *Suara Merdeka* pada bulan Januari–Februari 2015. Ada lima judul “Tajuk Rencana” yang menjadi sumber data penelitian. Berikut ini daftar judul “Tajuk Rencana” yang diambil sebagai data penelitian.

No.	Judul “Tajuk Rencana”	Tanggal
1.	“Setelah Calon Kapolri Jadi Tersangka”	14 Januari 2015
2.	“KPK dalam Kepungan”	22 Januari 2015
3.	“Jangan Biarkan KPK Runtuh”	24 Januari 2015
4.	“Rakyat, Partai Politik, dan Presiden”	27 Januari 2015
5.	“Melawan Pusaran Politik Oligarki”	6 Februari 2015

Pengumpulan data dalam kajian ini menggunakan metode simak, yaitu metode pengumpulan data dengan cara menyimak penggunaan bahasa yang kemudian dilanjutkan dengan teknik catat (Sudaryanto, 1993: 133). Penggunaan bahasa yang disimak berupa wacana “Tajuk Rencana” Harian *Suara Merdeka* yang membahas konflik KPK vs Polri jilid II. Wacana tersebut dicermati kemudian diseleksi dan diklasifikasi berdasarkan relasi yang terdapat di dalam wacana. Hasilnya berupa penggalan wacana yang di dalamnya terdapat kosakata dan gramatika yang merepresentasikan relasi-relasi partisipan dalam wacana.

Untuk menganalisis data, digunakan metode analisis isi kualitatif. Analisis isi kualitatif digunakan untuk memahami pesan simbolik dari suatu wacana. Pesan simbolik tersebut berupa aspek-aspek nonlingual. Dalam pesan simbolik inilah tersirat makna

wacana. Makna laten tersebut tersebar, baik melalui kosakata maupun gramatika. Untuk menangkap makna laten dalam wacana dilakukan pemaknaan teks atau wacana. Dalam memaknai teks penulis lebih mengandalkan interpretasi atau penafsiran. Adapun pendekatan yang digunakan ialah pendekatan kritis. Pendekatan kritis memandang bahasa dalam hubungan dengan kekuasaan, terutama dalam membentuk subjek serta pelbagai tindakan representasi yang terdapat di dalam masyarakat. Pendekatan kritis tidak hanya menganalisis bahasa dari aspek bahasa saja, tetapi juga mengaitkannya dengan konteks (Badara, 2012). Dalam hal ini, konteks sebagai karakteristik lain dari situasi sosial atau peristiwa komunikasi yang secara sistematis dapat memengaruhi teks atau wacana (Djatmika, 2014: 4). Adapun penelitian kualitatif kritis dilakukan dengan cara mendeskripsikan, menginterpretasikan, dan menjelaskan ideologi laten yang terdapat di dalam teks “Tajuk Rencana” *Suara Merdeka*.

## 3. Pembahasan

Relasi kekuasaan berkaitan dengan hubungan sosial yang terjalin di antara partisipan yang terlibat dalam sebuah wacana. Bagaimana hubungan antara redaksi, khalayak, dan partisipan yang terdapat dalam wacana tersirat dalam teks. Relasi kekuasaan menggambarkan hubungan asimetris (tidak seimbang) di antara partisipan. Misalnya, bagaimana individu atau institusi yang satu mendominasi atau memarjinalkan individu atau institusi yang lain dalam wacana. Dalam “Tajuk Rencana” *Suara Merdeka* yang membahas kasus KPK vs Polri Jilid II hubungan antarpartisipan terjalin antara KPK dan Komjen Budi Gunawan; KPK dan Polri; KPK dan Istana; redaksi *Suara Merdeka* dan Presiden; Redaksi *Suara Merdeka* dan masyarakat; Presiden dan parpol; serta rakyat dan partai politik. Relasi antarpartisipan dalam wacana “Tajuk Ren-

cana" *Suara Merdeka* digambarkan melalui pemanfaatan kosakata dan gramatika seperti berikut.

### 3.1 Kosakata

Keberadaan kosakata tertentu digunakan sebagai alat untuk menggambarkan realitas dan relasi antarpartisipan dalam wacana. Hal itu dapat disimak dari keberadaan kata-kata kunci wacana. Dalam teks "Tajuk Rencana" *Suara Merdeka* yang membahas konflik KPK versus Polri jilid II, kata-kata kunci yang digunakan berupa pemanfaatan eufemisme dan kata-kata formal yang menonjol.

#### 3.1.1 Eufemisme

Eufemisme adalah ungkapan kebahasaan yang bertujuan untuk memperhalus sebuah keadaan sehingga apa yang ditangkap oleh mitra tutur (pembaca) tidak sama dengan keadaan sebenarnya (Santosa, 2012). Eufemisme digunakan untuk menggantikan kata lain dengan tujuan untuk menjadikannya lebih konvensional dan lebih dikenal sebagai upaya untuk menghindari nilai-nilai negatif (Fairclough, 2003: 134).

Dalam "Tajuk Rencana" yang berjudul "Jangan Biarkan KPK Runtuh" hubungan antarpartisipan terjalin antara KPK dan Istana. Istana, dalam wacana "Tajuk Rencana" itu, disebut-sebut sebagai pihak yang terkait dalam pelemahan KPK. Istana dalam hal ini mendominasi institusi KPK, seperti tampak dalam kutipan berikut.

(1) Banyak pihak menyebutnya sebagai pertarungan Polri versus KPK. Tetapi, benarkah hanya Polri versus KPK? Apakah bukan KPK versus Istana? Pertanyaan itu terlontar karena sudah sangat sering terlihat bagaimana Polri dan Kejaksaan menjadi "kepanjangan tangan" Istana dalam konteks kekuasaan, bukan dalam arti penegakan hukum. Kriminalisasi KPK beberapa kali terjadi ketika lem-

baga itu berurusan dengan kasus yang berpotensi mengaduk-aduk Istana. (TR "Jangan Biarkan KPK Runtuh")

Kutipan tersebut menengarai bahwa istana mempunyai peran dalam kriminalisasi KPK. Dalam hal ini, Polri sekadar sebagai *kepanjangan tangan* istana. Istilah *kepanjangan tangan* sendiri dapat makna 'melakukan sesuatu melalui orang atau pihak lain'. Menurut pandangan redaksi pihak istana merupakan pelaku kriminalisasi KPK melalui Polri. Eufemisme *kepanjangan tangan* digunakan untuk menunjuk secara halus keterlibatan istana dalam kisruh KPK. Tuduhan keterlibatan istana mengacu pada ditangkapnya Ketua KPK Antasari Azhar pada Mei 2009 ketika sedang mengusut kasus Century.

Menganalogikan dengan kejadian penangkapan Ketua KPK Antasari Azhar pada tahun 2009, penulis "Tajuk Rencana" menyinyalir kisruh antara Polri versus KPK terjadi karena KPK akan mengusut kasus yang diduga melibatkan orang dekat Istana, dalam hal ini mantan Presiden Megawati yang merupakan pimpinan partai yang memuluskan jalan Jokowi ke tangga presiden. Dengan kata lain, perseteruan Polri dan KPK tidak lepas dari kepentingan pihak Istana.

#### 3.1.2 Kata-Kata Formal yang Menonjol

Proses penyusunan kata pada sebuah teks bergantung dan membantu penciptaan hubungan sosial antarpartisipan. Situasi formal yang tergambar dalam teks membutuhkan hubungan formalitas dalam hubungan sosial. Hubungan itu menjadi jelas melalui penggunaan kosakatanya, yang secara konsisten memilih kata yang lebih formal daripada alternatif lain yang dirasa kurang formal (Fairclough, 2003: 134).

Kata-kata formal dalam "Tajuk Rencana" Harian *Suara Merdeka* digunakan untuk

menjelaskan relasi atau hubungan antar-partisipan dalam wacana. Hubungan antar-partisipan antara KPK dan Komjen Budi Gunawan terdapat dalam "Tajuk Rencana" yang berjudul "Setelah Calon Kapolri Jadi Tersangka". Hubungan yang terjalin antara KPK dan Komjen Budi Gunawan adalah hubungan antara penegak hukum dan tersangka. Dalam hal ini, KPK sebagai penegak hukum dan Budi Gunawan sebagai tersangka. Sebaliknya, karena statusnya sebagai pejabat tinggi polisi yang masih aktif, Komjen Budi Gunawan dianggap sebagai representasi dari lembaga Polri. Dengan demikian, KPK sebagai institusi mempunyai relasi yang dominan terhadap lembaga Polri. Hal tersebut tampak pada penggunaan kata formal *menetapkan*, seperti pada kutipan berikut.

(2) Di luar perkiraan pemerintah maupun DPR, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) *menetapkan* calon Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Komjen Jenderal Budi Gunawan, sebagai tersangka. Setelah rekening gendut Budi dicurigai, KPK menemukan unsur pidana dan lebih dari dua alat bukti untuk meningkatkan ke tahap penyidikan. (TR "Setelah Calon Kapolri Jadi Tersangka")

Dalam kalimat tersebut kewenangan KPK tercermin pada kata *menetapkan*. Sebagai institusi penegak hukum KPK mempunyai kewenangan untuk *menetapkan* seseorang sebagai tersangka. KPK menetapkan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka setelah menemukan dua buah alat bukti. Namun, dalam teks "Tajuk Rencana" tidak dijelaskan dua alat bukti apa yang sudah ditemukan oleh KPK. Hal itu menunjukkan adanya keberpihakan redaksi *Suara Merdeka* terhadap KPK dengan tidak memberikan informasi yang lengkap kepada khalayak pembaca.

Sementara itu, dalam "Tajuk Rencana" yang berjudul "KPK dalam Kepung-

an", hubungan antara KPK dan Polri terjadi karena kedua lembaga tersebut sama-sama berperan sebagai penegak hukum. Hal tersebut digambarkan dengan penggunaan kata-kata formal, yaitu *menegakkan hukum* dan *memberantas korupsi*. Baik KPK maupun Polri mempunyai tugas yang sama, yaitu *menegakkan hukum* dan *memberantas korupsi*. Selain itu, banyak penyidik KPK yang berasal dari kepolisian sehingga antara KPK dan Polri tidak perlu ada perselisihan.

(3) Mengapa masyarakat berharap tidak ada perang lagi antara KPK dan Polri? Sebab, pada dasarnya, kedua lembaga itu sama-sama memanggul tugas untuk *menegakkan hukum dan memberantas korupsi*. (TR "KPK dalam Kepungan")

Hubungan antara KPK dan Polri (Bareskrim) yang lain tergambar dalam "Tajuk Rencana" yang berjudul "Pelum-puhan KPK Ancaman Serius". Dalam "Tajuk Rencana" tersebut tindakan penetapan pimpinan KPK menjadi tersangka oleh Bareskrim Polri seolah-olah sebagai tindakan *balas dendam*. Hal tersebut terjadi karena adanya sejarah hubungan yang kurang harmonis antara KPK dan Polri. Seperti diketahui, pada kasus KPK vs Polri jilid I, Kabareskrim pada saat itu, yaitu Komjen Susno Duadji juga dijadikan tersangka oleh KPK dalam kasus korupsi Bank Century. Sejarah itu seperti terulang ketika calon Kapolri Komjen Budi dijadikan tersangka oleh KPK kemudian Bareskrim menjadikan pimpinan KPK sebagai tersangka. Hal tersebut tampak pada penggalan wacana berikut.

(4) Setelah **Bambang Widjojanto** berstatus tersangka kasus kesaksian Pilkada Kota Waringin Barat, **Ketua KPK Abraham Samad** bakal menyanggah status sama untuk kasus lobi politik semasa Pilpres 2014. Kabareskrim Polri Irjen Budi Waseso telah memastikan **Abraham** segera

dijadikan tersangka. (TR “Pelumpuhan KPK Ancaman Serius”)

Pada penggalan wacana di atas disebutkan dengan jelas bahwa pimpinan KPK yang dijadikan tersangka oleh Polri, yaitu Wakil Ketua Bambang Widjojanto dan Ketua Abraham Samad. Tindakan yang dilakukan oleh Bareskrim Polri tersebut menurut pandangan redaksi sebagai upaya kriminalisasi terhadap pimpinan KPK. Dari tindakan menjadikan tersangka, baik terhadap petinggi Polri maupun pimpinan KPK terlihat relasi yang asimetris. Dalam hal ini, institusi Polri mendominasi institusi KPK. Tindakan KPK menjadikan tersangka petinggi Polri tidak mengancam eksistensi Polri secara institusional. Sebaliknya, tindakan Polri menjadikan tersangka pimpinan KPK dapat melumpuhkan institusi KPK karena dalam setiap pengambilan keputusan pimpinan KPK bersifat kolektif kolegial. Kolektif kolegial adalah sebuah mekanisme atau proses dalam pengambilan keputusan (persetujuan) yang dilakukan secara bersama-sama dalam kedudukan yang sama sebagai pimpinan KPK. Oleh karena itu, penangkapan terhadap pimpinan dianggap sebagai salah satu upaya pelemahan KPK. Dengan ditangkapnya salah seorang pimpinan KPK, maka KPK tidak dapat mengambil keputusan. Akibatnya, KPK tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagai institusi yang melaksanakan pemberantasan korupsi.

Hubungan antara presiden dan partai politik terdapat dalam “Tajuk Rencana” yang berjudul “Rakyat, Partai Politik, dan Presiden”. Hubungan tersebut digambarkan sebagai relasi yang tidak seimbang (asimetris). Dalam hal ini parpol lebih dominan daripada presiden. Hal tersebut tampak pada ketidakberdayaan presiden untuk menolak pencalonan kapolri yang merupakan *desakan kekuatan parpol*. Padahal, calon tersebut mempunyai catatan buruk di KPK karena mempunyai rekening yang dicurigai ha-

sil dari tindak korupsi, tetapi presiden tidak mampu menolaknya.

(5)Pencalonan Komjen Budi Gunawan sebagai kapolri merupakan puncak kekecewaan masyarakat yang menilai pencalonan itu akibat *desakan kekuatan partai politik* terhadap Presiden, sehingga kendati yang dicalonkan sudah memperoleh “stabilo merah” dari KPK, Presiden *tidak mampu menolak* untuk tidak mencalonkannya. Keterlibatan partai politik yang dianggap terlalu jauh itu sudah tercium sejak “bagi-bagi kursi menteri” di kabinet kerja. (TR “Rakyat, Partai Politik, dan Presiden”)

Makna relasional negatif terhadap presiden tampak pada penggunaan kosakata *desakan* dan *tidak mampu*. Frasa *desakan kekuatan parpol* secara implisit menunjukkan bahwa relasi kuasa partai politik lebih dominan daripada presiden. Sebaliknya, secara eksplisit tampak pada penggunaan klausa *tidak mampu menolak* yang menunjukkan ketidakberdayaan presiden sebagai kepala pemerintahan. Padahal, menurut Pasal 11 ayat (1), Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, Kapolri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Hal tersebut menandai bahwa pemilihan Kapolri sebenarnya merupakan hak prerogatif presiden. Namun, realitas politik tidak sama dengan aturan normatif. Presiden tidak dapat lepas dari kepentingan partai-partai pendukung yang mengantarnya ke kursi kepresidenan

### 3.2 Gramatika

Aspek gramatika dalam isi wacana berkaitan dengan persoalan-persoalan klausa atau kalimat. Kajian terhadap aspek gramatika meliputi kajian terhadap pilihan (a) penggunaan kalimat interogatif dan (b) kata ganti orang kita. Berikut ialah pemba-

hasan aspek gramatika pada wacana "Tajuk Rencana" *Suara Merdeka* yang membahas konflik KPK vs Polri Jilid II.

### 3.2.1 Penggunaan Kalimat Interogatif

Modus kalimat berkenaan dengan bagaimana kalimat diekspresikan kepada mitra bicara. Ada tiga macam modus, yaitu deklaratif, interogatif, dan imperatif. Dalam interogatif penutur atau penulis meminta sesuatu (informasi) kepada mitra tutur, dan mitra tutur sebagai penyedia informasi (Fairclough, 2003: 143; Santoso, 2012: 156).

Hubungan antara rakyat dan partai politik dalam "Tajuk Rencana" yang berjudul "Rakyat, Partai Politik, dan Presiden" digambarkan pada paragraf pertama wacana dengan kalimat interogatif *di mana posisi dan peran rakyat* dalam sistem politik dan kekuasaan. Apakah *tugas rakyat selesai* dengan memberikan suaranya kepada wakil rakyat dan pemimpin pemerintahan?

(6) Di manakah *posisi dan peran rakyat* pemilih dalam sistem politik dan kekuasaan? Apakah *tugas rakyat selesai* dengan memberikan suaranya kepada wakil rakyat dan pemimpin pemerintahan? Pertanyaan-pertanyaan itu merupakan problem klasik demokrasi yang kini sedang mencuat kembali ketika panggung kekuasaan mempertontonkan kisruh antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Polri dengan Presiden yang berada di tengah-tengah kekisruhan tersebut. (TR "Rakyat, Partai Politik, dan Presiden")

Seperti diketahui dalam setiap pemilu partai politik berlomba-lomba untuk mendapatkan suara dari rakyat. Dengan janji-janji manisnya partai politik berusaha mendapatkan simpati dan dukungan dari rakyat. Namun, setelah berhasil mendapatkan kursi, baik di tingkat eksekutif atau legislatif, mereka biasanya lupa akan janji-janjinya. Inilah yang menyebabkan partai poli-

tik dipandang sebagai bagian kotor dalam kehidupan bernegara. Partai politik seharusnya menghasilkan orang-orang yang profesional, berintegritas, beretika, dan bermoral sehingga dapat mengelola negara dan pemerintahan dengan sebaik-baiknya. Jika demikian, pada akhirnya akan tercapailah tujuan bernegara, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil, mak-mur, dan sejahtera. Di sinilah simbiosis mu-tualisme antara rakyat dan partai politik seharusnya terjalin. Namun, kenyataannya rakyat hanya menjadi sapi perah bagi kepentingan partai politik. Dalam hal ini, "Tajuk Rencana" *Suara Merdeka* menulis opini *menghukum partai politik*, seperti tampak pada kutipan berikut.

(7) Di tengah-tengah kekecewaan rakyat atas kisruh KPK versus Polri dan kegamangan Joko Widodo, bersahutan opini yang berniat *menghukum partai politik* pada pemilu mendatang. Hukuman itu mungkin penting, tetapi menunggu lima tahun terlalu lama untuk mendidik politikus. Rakyat kini berada pada posisi untuk memetakan lagi hubungannya dengan partai politik dan politikus agar sama-sama berperan membangun sistem kekuasaan yang bersih dan sehat. (TR "Rakyat, Partai Politik, dan Presiden")

Dalam "Tajuk Rencana" tersebut tidak dijelaskan apa bentuk hukuman rakyat terhadap partai politik. Apakah dengan tidak memberikan suara terhadap partai politik dalam pemilihan umum (pemilu) yang berarti golput atau bagaimana? Karena bagaimana pun partai politik membutuhkan suara rakyat dalam pemilu. Kalaupun rakyat golput, yang kemudian menjadi pertanyaan bagaimana rakyat memilih pemimpin mereka? Dari sisi lain, kalau sebuah negara mengalami kekosongan kekuasaan (*vacuum of power*), akan muncul diktator atau kepemimpinan militer. Hal itu menjadi kontra

produktif dengan tujuan utama menghukum parpol, yaitu agar muncul parpol yang ideal sesuai harapan rakyat. Dengan demikian, apa pun yang terjadi rakyat selalu pada posisi yang marginal (terdominasi).

### 3.2.2 Pronomina *Kita*

Pronomina persona atau kata ganti orang berkaitan dengan kekuasaan dan solidaritas (Fairclough, 2003: 82). Untuk menunjukkan kekuasaan dan solidaritas penghasil teks akan menggunakan kata atau bentuk kata tertentu, khususnya pronomina persona pertama, baik tunggal maupun jamak (Santoso, 2012: 158).

Relasi antara *Suara Merdeka* dan masyarakat (khalayak pembaca) dalam wacana "Tajuk Rencana" yang membahas persetujuan KPK dan Polri jilid II terjalin dalam strategi kehadiran diri. Strategi kehadiran diri yang digunakan redaksi dalam teks "Tajuk Rencana" ialah penggunaan kata ganti orang pertama jamak *kita*, seperti tampak dalam penggalan wacana berikut.

(8) *Kita* tahu Presiden Jokowi terkejut dan menganggap kasus Budi telah selesai lewat klarifikasi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada 2010. Tak ada juga tanda-tanda rekening gendut Budi bakal dipersiapkan di jalur hukum. Tentu terkejut saja, tidak cukup. Jokowi harus segera merespons persoalan ini agar tak dianggap sebagai presiden yang antipemberantasan korupsi. (TR "Setelah Calon Kapolri Jadi Tersangka")

Pronomina persona *kita* merupakan bentuk inklusif. Dalam teks tulis kata *kita* menyangkut tidak hanya penulis, tetapi merujuk sekaligus pada pembaca. Dengan menggunakan pronomina persona *kita* redaksi memosisikan diri sebagai bagian dari masyarakat. Hal itu tampak pada kalimat "Kita tahu Presiden Jokowi terkejut dan menganggap kasus Budi telah selesai lewat klarifikasi Pusat Pelaporan dan Analisis

Transaksi Keuangan (PPATK) pada 2010." Dalam hal ini, penggunaan kata ganti orang pertama jamak *kita* bersifat inklusif karena tidak hanya mengacu pada kelompok masyarakat tertentu, tetapi masyarakat secara umum. Meskipun, belum tentu masyarakat umum tahu kalau presiden terkejut dengan penetapan tersangka Komjen Budi Gunawan.

Dalam "Tajuk Rencana" yang lain redaksi *Suara Merdeka* menggunakan strategi kehadiran diri dengan mengatasnamakan masyarakat. Strategi itu terlihat dalam tulisan berikut.

(9) *Masyarakat* sebetulnya berharap bahwa dugaan "perang" antara Polri versus KPK itu tidaklah benar.

Mengapa *masyarakat* berharap tidak ada perang lagi antara KPK dan Polri? Sebab, pada dasarnya, kedua lembaga itu sama-sama memanggul tugas untuk menegakkan hukum dan memberantas korupsi.

Pemberantasan korupsi sudah sepentasnya ditempatkan pada prioritas tertinggi karena kerusakan kehidupan negara dan *masyarakat* akibat tindak korupsi sedemikian parah meski tidak tampak apabila dibandingkan dengan kejahatan yang memakan korban-korban yang terlihat seperti pembunuhan atau narkoba.

Prioritas tertinggi pemberantasan korupsi itu semestinya dihayati oleh seluruh *warga negara tanpa terkecuali*. (TR "KPK dalam Kepungan")

Kata *masyarakat* pada penggalan "Tajuk Rencana" tersebut bermakna inklusif atau umum. Hal tersebut tampak jelas ketika penulis "Tajuk Rencana" (Redaksi *Suara Merdeka*) menggunakan kohesi leksikal berupa sinonim, yaitu *warga negara tanpa terkecuali*. Frasa *tanpa terkecuali* pada ungkapan tersebut mengacu pada masyarakat umum, bukan hanya khalayak pembaca harian *Suara Merdeka* atau kelompok ma-

syarakat tertentu saja. Dalam hal ini, redaksi menganggap apa yang menjadi pendapatnya merupakan representasi pendapat masyarakat. Seperti diketahui "Tajuk Rencana" merupakan tipe wacana satu arah. Artinya, hanya pihak redaksi yang dapat menyampaikan ide, gagasan, atau pendapatnya kepada khalayak pembaca, sedangkan pihak pembaca hanya dapat menerima informasi tanpa dapat memberikan respons balik secara langsung. Komunikasi yang tidak seimbang ini (relasi asimetris) menempatkan pembaca pada posisi marginal. Dengan mengatasnamakan rakyat redaksi seperti mendapat legitimasi untuk menyampaikan ideologinya.

Strategi kehadiran diri yang serupa juga digunakan dalam "Tajuk Rencana" yang berjudul "Jangan Biarkan KPK Runtuh". Hal tersebut tampak ketika redaksi memosisikan dirinya sebagai publik dalam menyatakan opininya.

(10) *Publik* melihat peristiwa itu sebagai tindakan balas dendam Polri terhadap KPK. Gerakan dan aksi solidaritas "selamatkan KPK" segera merebak di seluruh tanah air. Masyarakat menilai bahwa penangkapan Bambang Widjojanto bertujuan melemahkan KPK. Tuduhan yang disangkakan kepada Bambang dipandang terlalu mengada-ada karena tuduhan itu terkait dengan dugaan mobilisasi keterangan palsu di Mahkamah Konstitusi dalam sengketa Pilkada 2010. (TR "Jangan Biarkan KPK Runtuh")

Penggalan wacana di atas menunjukkan redaksi menggunakan sudut pandang masyarakat dengan menggunakan kata *publik* sebagai strategi kehadiran diri. Dalam kalimat, "*Publik* melihat peristiwa itu sebagai tindakan balas dendam Polri terhadap KPK" redaksi ingin menyatakan bahwa peristiwa penangkapan Bambang Widjojanto oleh Bareskrim Polri merupakan

pendapat masyarakat. Verba *melihat* pada kalimat tersebut bermakna 'menganggap', bukan bermakna 'melihat' dalam arti sesungguhnya (leksikal). Dengan menggunakan strategi kehadiran diri dengan mengatasnamakan masyarakat, redaksi bertujuan untuk menghegemoni khalayak dengan ideologinya.

#### 4. Simpulan

Berdasarkan pembahasan di atas relasi kekuasaan dalam wacana konflik KPK vs Polri jilid II dideskripsikan oleh redaksi *Suara Merdeka* dengan memanfaatkan aspek kebahasaan yang berupa kosakata dan gramatika. Pemanfaatan kosakata tersebut berupa penggunaan eufemisme dan kata-kata formal yang menonjol. Sementara itu, pemanfaatan gramatika berupa kalimat interogatif dan pronomina persona kita. Adapun relasi antarpartisipan yang terjalin dalam wacana, yaitu antara KPK dan Komjen Budi Gunawan; KPK dan Polri; KPK dan Istana; Redaksi *Suara Merdeka* dan Presiden; Redaksi *Suara Merdeka* dan masyarakat; Presiden dan parpol; rakyat dan partai politik. Dalam mendeskripsikan relasi tersebut, redaksi menempatkan institusi Polri pada posisi dominan, sebaliknya institusi KPK pada posisi yang dimarginalkan oleh institusi Presiden dan Polri. Sementara itu, institusi Presiden oleh redaksi dideskripsikan pada posisi yang marginal terhadap partai politik.

#### Daftar Pustaka

- Aji, E.N.W. 2017. "Pandangan Harian Suara Merdeka dalam Konflik KPK Vs Polri Jilid II (Analisis Wacana Kritis pada "Tajuk Rencana)". *Jurnal Seloka*, 6 (3), 256 – 264.
- Aji, E.N.W. 2018. "Gramatika dalam Wacana Konflik KPK Vs Polri Jilid II". *Jurnal Sawerigading*, 24 (1), 85 – 95.

- <https://doi.org/10.26499/sawer.v24i1.488>
- Aslam, M.H.T.B. 2017. "Framing Pemberitaan Kasus KPK Vs Polri di Surat Kabar *Tribun Timur*". *Jurnal Kareba*, 6 (2), 235-240.  
<https://doi.org/10.31947/kjik.v6i2.5319>
- Badara, A. 2012. *Analisis Wacana: Teori, Metode, dan Penerapannya pada Wacana Media*. Jakarta: Kencana.
- Djarmika. 2014. *Pernik Kajian Wacana*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Fairclough, N. 2003. *Language and Power: Relasi Bahasa, Kekuasaan, dan Ideologi*. Malang: Boyan.
- Hidayat, M. 2018. "Analisis Framing Robert Entman pada Pemberitaan KPK Vs Polri Jilid III (Studi Kasus pada Koran *Tempo* dan *Media Indonesia* Periode Januari Sampai dengan Juni 2015)". *Jurnal Media Kom*, 8 (2), 1 – 9.
- Rokhman, F. dan Surahmat. 2016. *Politik Bahasa Penguasa*. Jakarta: Kompas.
- Santosa, A. 2012. *Studi Bahasa Kritis Mengungkap Bahasa Membongkar Kuasa*. Bandung: Mandar Maju.
- Sudaryanto. 1993. *Metode dan Aneka Teknik Analisis Bahasa*. Yogyakarta: Sanata Dharma University Press.
- Wahyuni, S. 2016. "Representasi Kekuasaan dalam Imbauan di ruang Publik". *Jurnal Widyaparwa*, 44 (1), 41--50.  
<https://doi.org/10.26499/wdprw.v44i1.114>